PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PROBLEMATIKA LINGKUNGAN HIDUP DI JAWA TIMUR DAN PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENYELESAIKAN PERSOALAN LINGKUNGAN HIDUP

ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP JAWA TIMUR

- PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
- PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3
- PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAHAN
- PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
- PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR

INTEGRASI HULU-HILIR PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan = Penerapan Prinsip Lingkungan dalam Pembangunan (UU 17/2007 TENTANG RPJP INDONESIA)

TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

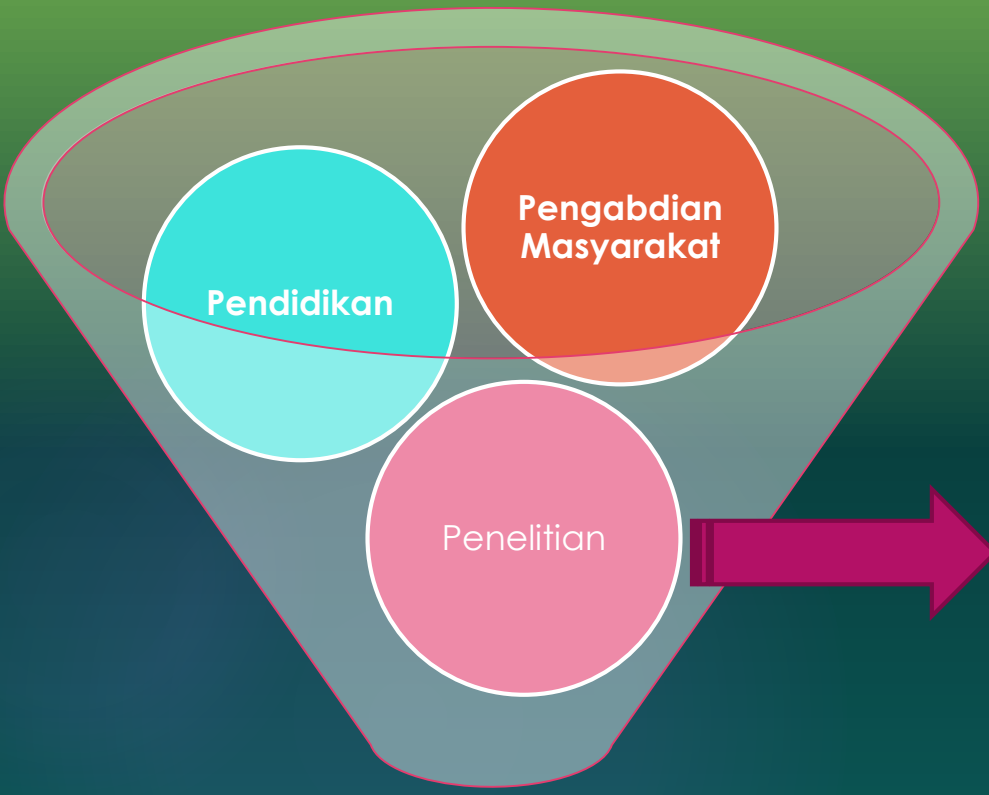

TRIDHARMA

PERENCANAAN

R P P L H → NASKAH AKADEMIK

KAJIAN LINGKUNGAN

INOVASI ILMIAH

KREATIFITAS MAHASISWA

Sinergitas RPJM, RTRW DAN RPPLH

Bagaimana memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program

Pemerintah Daerah wajib **melaksanakan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi** RTRW Daerah beserta rencana rincinya, RPJP D dan RPJM D (Pasal 15 UU 32/2009)

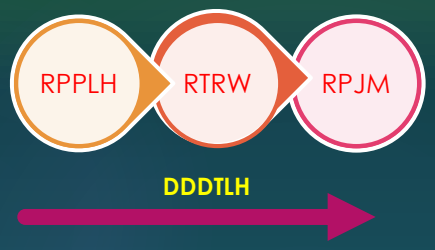

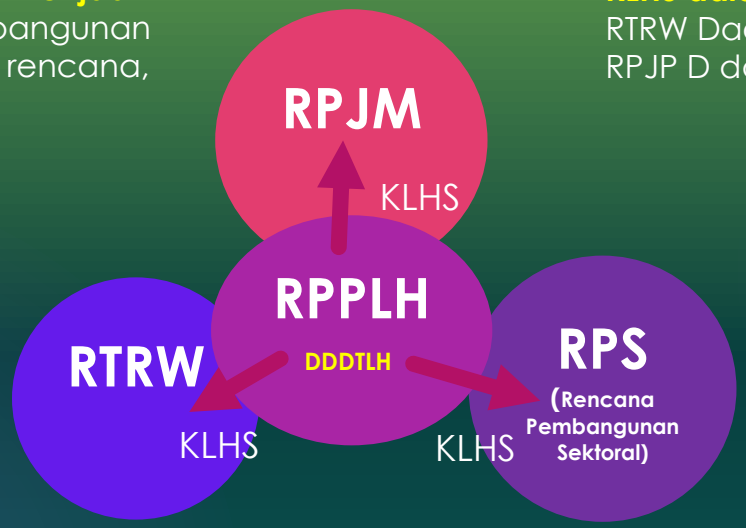

Perencanaan bidang lingkungan hidup sangat strategis sebagai media

1. Koordinasi
2. Integrasi
3. Sinkronisasi
4. Sinergi

Dalam pencapaian tujuan pembangunan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan

UU NO. 25 TAHUN 20014		UU NO. 26 TAHUN 2007	UU NO. 32 TAHUN 2009	UU SEKTORAL (PARIWISATA)
RPJP-N	RPJM-N	RTRW-N	RPPLH-N	RIPPNAS
RPJP-P	RPJM-P	RTRW-P	RPPLH-P	RIPPDA-P
RPJP-K	RPJM-K	RTRW-K	RPPLH-K	RIPPDA-K
RPJP-Kota	RPJM-Kota	RTRW-Kota	RPPLH-Kota	RIPPDA-Kota

Pasal 12 (UU No 32 Tahun 2009). Pemanfaatan SDA dilakukan berdasarkan RPPLH. Apabila RPPLH belum tersusun, maka dapat menggunakan daya dukung dan daya tampUng lingkungan hidup

RPPLH, KLHS dan SDGs

RPPLH disusun untuk menjadi dasar dan dimuat dalam:

1. RPJMN dan RPJPN untuk RPPLH Nasional;
2. RPJMD dan RPJPD untuk RPPLH Provinsi dan RPPLH Kabupaten/Kota;
3. menjadi arahan pemanfaatan sumber daya alam yang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

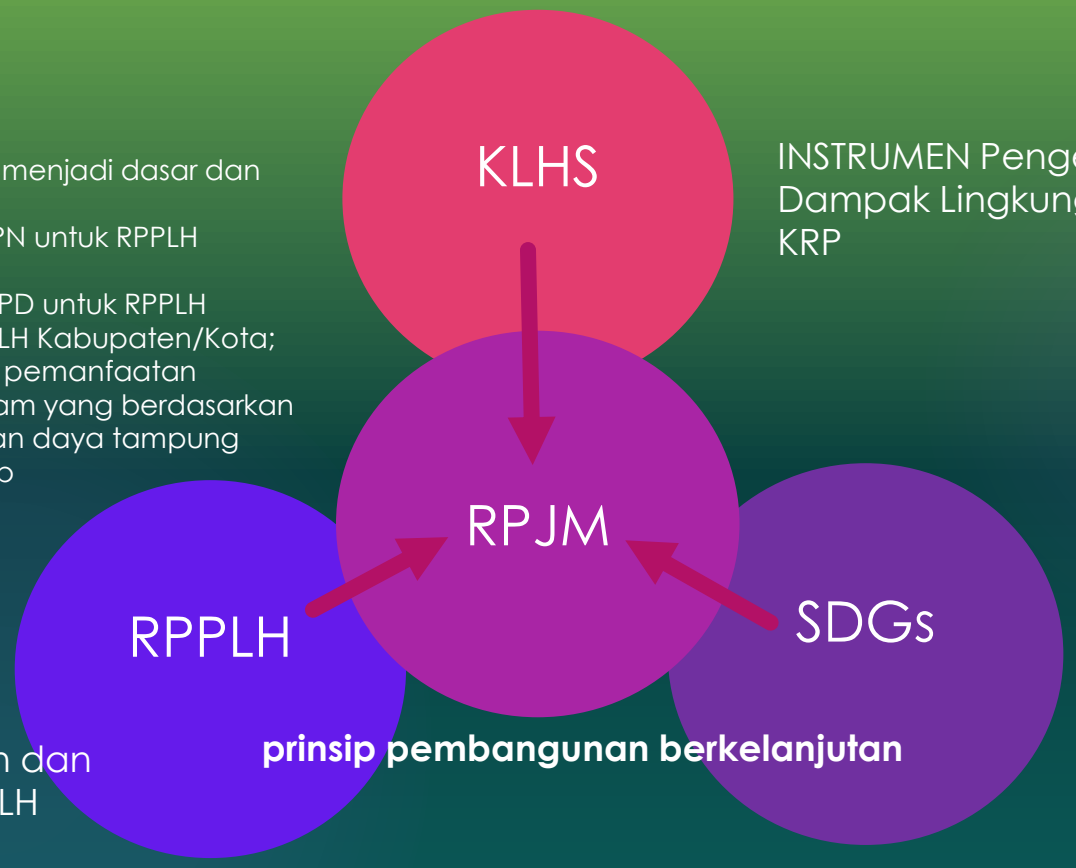

INSTRUMEN Pengendalian Dampak Lingkungan dari KRP

KEBIJAKAN pengendalian dan pengelolaan LH

TUJUAN Pembangunan Berkelanjutan

UU 32/2009 RPJM/RTRW mengacu RPPLH

1. Memasukkan nilai-nilai substansial dan Kebijakan (RPPLH) dan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan dalam KRP (SDGs)
2. Memastikan KRP berdampak lingkungan minimal dan dapat dikendalikan (KLHS)

TRIDHARMA

PERGURUAN TINGGI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

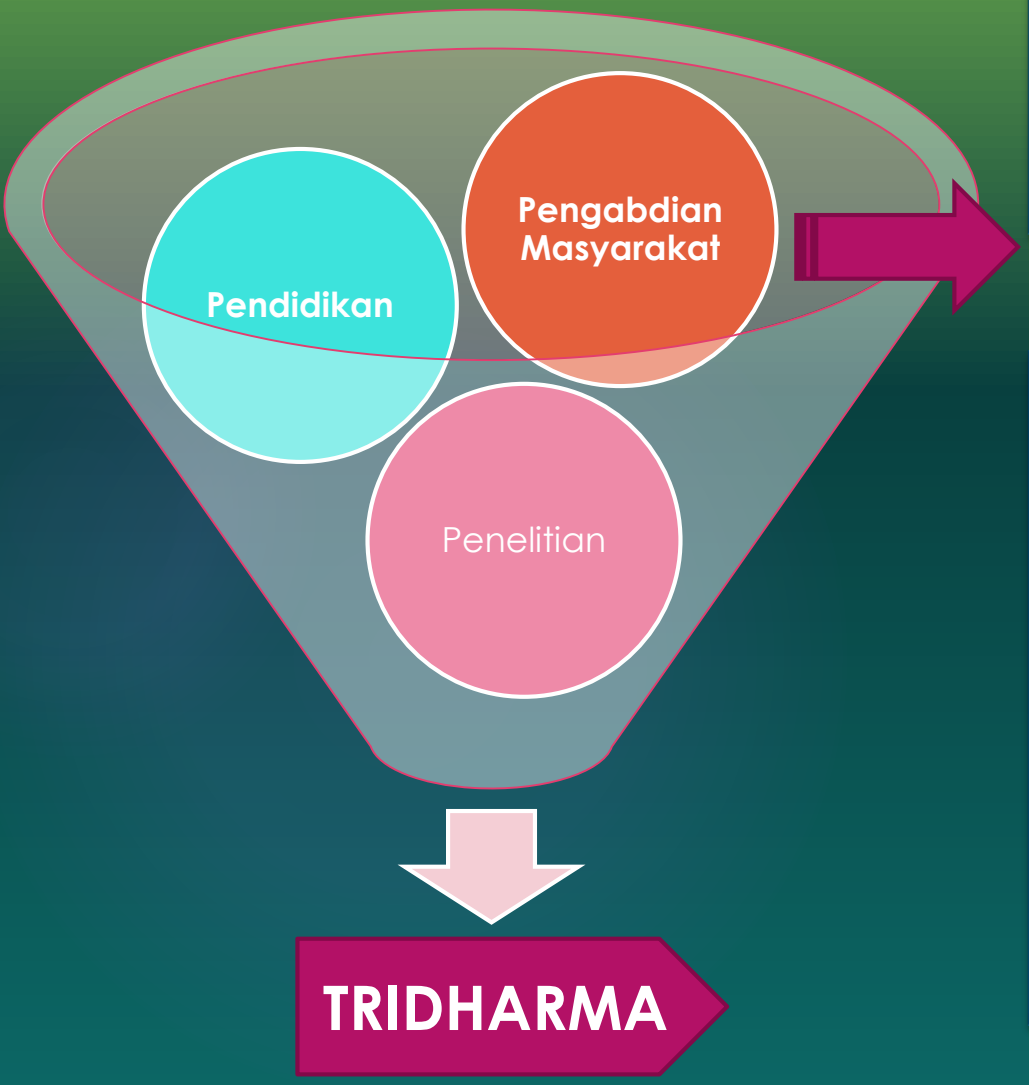

PENGENDALIAN

1. Komunitas Lingkungan
2. Tim siaga Bencana
3. Ecocampus
4. Action Learning
5. Kampanye Ramah Lingkungan

PEMELIHARAAN

1. Konservasi Hutan dan Lahan Gambut
2. Koservasi Air
3. Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

PEMANFAATAN

Penyusunan Jasa Ekosistem :

1. Jasa Penyediaan (Pangan, Air Bersih, Bahan Bakar, Kayu dan Fosil
2. Jasa Pengaturan (Pengaturan Iklim, Pengaturan Tata Aliran Air & Banjir, Pemeliharaan Kualitas Udara)
3. Jasa Budaya (*Ecotourism*)
4. Jasa Pendukung (Biodiversitas, Siklus Hara)

PENGAWASAN & PENEGAKAN HUKUM

Pakar/Ahli Lingkungan

Thank You